



Pola Pemukiman Kumuh Pada Pinggiran Bantara Rel Kereta Api Di Jl. Ampera Raya, Kec. Medan Timur, Kota Medan

Slum Settlement Patterns On The Railway Sidings at Jl. Ampera Raya, Kec. Medan Timur, Medan City

Edwin Pasti Tabah Zega & Rina Saraswati*

Universitas Medan Area, Indonesia

*Corresponding author: E-mail: rinasaraswati@staff.uma.ac.id

Abstrak

Pola pemukiman adalah tempat manusia bermukim dan melakukan aktivitas sehari-hari. Bentuk penyebaran penduduk dapat dilihat berdasarkan kondisi alam dan aktivitas penduduk. Menurut Wicaksono (2010) pola pemukiman kumuh yaitu pemukiman yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat mencapai kehidupan layak bagi penghuninya. Jalan Ampera Raya, kota Medan, merupakan salah satu area pemukiman kumuh di kota Medan. Area ini merupakan area bantaran rel kereta api. Tujuan penelitian adalah melihat pola pemukiman kumuh pada pinggiran bantaran rel kereta api. Adapun metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, deskripsi dengan menggunakan observasi lapangan, wawancara dan kuesioner. Menurut hasil pemukiman, pola pemukiman karakteristik bangunan yang padat di sekitar pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan. Tingkat keamanan, kemampuan untuk mengakses fasilitas umum, dan manajemen limbah adalah beberapa aspek yang dipengaruhi oleh kondisi ini. Semua aspek ini menarik perhatian penduduk setempat.

Kata Kunci : Bantaran Rel Kereta Api; Kawasan Kumuh; Pola Pemukiman

Abstract

This study examines settlement patterns are places where humans live and carry out daily activities. The form of population distribution can be seen based on natural conditions and populations activities. According to wicaksono (2010), a slum settlement pattern is a settlement where it is no longer possible to achieve a decent life for its residents. Jalan ampera raya, medan city, is one of the slum areas in the city of medan. This area is an area near the railroad tracks. The aim of the research is to look at the pattern of slum settlements on the outskirts of the railroad tracks. The research method was carried out using descriptive quantitative qualitative methods using field observations, interviews and questionnaires. According to the research results, the pattern of slum settlements in the area tends to be linear, following railway lines, and has the characteristics of denses buildings around centers of economic and educational activity. The level of security, ability to access public facilities, and waste management are some of the aspects affected by this condition. All these aspects attract the attention of local residents.

Keywords : Railroad Tracks; Slum Area; Settlement Patterns

How to Cite: Zega, E.P.T., Saraswati, R., (2025), Pola Pemukiman Kumuh Pada Pinggiran Bantaran Rel Kereta Api di Jl. Ampera Raya, Kec. Medan Timur, Kota Medan, *Journal of Architecture and Urbanism Research*, Vol 8(2): 521-533

PENDAHULUAN

Kota pada umumnya berasal dari pemukiman kecil dan memiliki lokasi strategis bagi kegiatan perdagangan. [1] proses transformasi suatu kota dari satu keadaan ke keadaan yang lain dan dalam jangka waktu yang berbeda dikenal sebagai berkembangnya suatu kota. Beberapa hal yang membedakannya adalah jumlah penduduk yang meningkat dan perlahan lahan menjadi padat penduduk, bangunan-bangunan yang semakin rapat, dan wilayah terbangun terutama pemukiman yang cenderung semakin luas, peningkatan sarana dan prasarana kota menjadi penting untuk mendukung kegiatan kota, terutama kegiatan sosial dan ekonomi.[1].

Akibat urbanisasi, pertumbuhan populasi (orang) di kota Medan sangat mempengaruhi kemajuan pembangunannya, terutama bagi pendatang yang akhirnya menetap. Gelombang urbanisasi yang dipicu oleh pembangunan fisik sarana dan prasarana kota mendorong pertumbuhan pembangunan di semua sektor lingkungan perkotaan. Hal yang menarik para warga yang menginginkan peluang kehidupan yang lebih baik. Laju pembangunan yang cepat menyebabkan perkembangan kota seolah tanpa arah.[2]

Karena banyaknya yang tinggal di pusat kota, ada kebutuhan akan pemukiman yang layak huni. Ini terutama berlaku untuk menampung kaum urbanis yang bekerja di bidang perdagangan dan jasa di kawasan komersial pusat kota yang ada. Menurut Suriani (2006), [3] ketersediaan semua fasilitas di pusat kota menarik orang untuk tinggal disana.[4]

Pemukiman dengan kepadatan penduduk tinggi memiliki sarana prasarana yang buruk (Budiharjo, 1998). pemukiman kumuh dapat didefinisikan sebagai lingkungan dengan banyak penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang buruk, dan jumlah rumah yang sangat padat dengan ukurannya dibawah rata-rata. UN-Habitat (2018) juga menyatakan bahwa pemukiman kumuh memiliki lingkungan yang terdegradasi, bangunan tidak layak huni, kepadatan tinggi, dan kekurangan layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi. Selain itu, menurut Sari & Ridlo (2021), pemukiman adalah suatu kawasan perumahan yang berfungsi sebagai unit, fisik, sosial, dan ekonomi yang terdiri dari prasarana lingkungan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Pemukiman menggabungkan kepentingan dan keselerasan pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan.[1]

Banyak faktor menyebabkan pemukiman kumuh. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ada banyak hal yang dapat menyebabkan kawasan pemukiman kumuh. Ini termasuk urbanisasi, ekonomi, sosial budaya, lahan perkotaan, sarana prasarana yang tidak memadai, tata ruang, daya dan perkotaan, status kepemilikan bangunan, dan lama tinggal penghuni. Selain itu, penelitian Krisandriyana (2007), [3] menunjukkan bahwa tata ruang, ekonomi, dan status kepemilikan bangunan dapat menjadi penyebab munculnya pemukiman kumuh. Menurut Sadana (2014), [5] dua penyebab utama pemukiman kumuh adalah pertumbuhan kota yang cepat yang tidak diimbangi oleh tingkat pendapatan yang cukup; keterlambatan pemerintah kota

Edwin Pasti TZ, Rina Saraswaty, Pola Pemukiman Kumuh Pada Pinggiran Bantaran Rel Kereta Api di Jl. Ampera Raya, Kec. Medan Timur, Kota Medan

dalam merencanakan dan membangun prasarana kota, terutama jalan, di daerah perkembangan pemukiman baru; dan, sebagai akibat dari keterlambatan ini, sebagian besar pemukiman di kota dibangun tanpa memiliki fasilitas yang memadai.[6]

Berdasarkan data kawasan kumuh di kota Medan sesuai dengan SK Walikota nomor 050 tahun 2022 disebutkan bahwa lokasi kawasan kumuh atau pemukiman di kota Medan terdapat di 33 kelurahan yang tersebar di 14 kecamatan. Pemerintah kota Medan melakukan sebagai upaya penanganan dan penataan kawasan pemukiman kumuh pada tahun 2022 yang memiliki luas yaitu 306 hektare yang seluruhnya masuk dalam kawasan kumuh ringan.[1]

Kecamatan Medan Timur memiliki potensi sosial ekonomi yang baik karena didalamnya terdapat lingkungan akademisi, stasiun kereta api, dan area komersial. Potensi sosial ekonomi ini menyebabkan banyak aktivitas disana. Karena wilayah tersebut menarik untuk dijadikan tempat bermukim, semakin banyak pendatang yang ingin tinggal dan menetap disana. Akibatnya, kebutuhan lahan meningkat, yang mengakibatkan terjadinya Pembangunan di lahan yang terbatas, pada akhirnya menghasilkan Kawasan kumuh.[7]

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh didefinisikan sebagai permukiman yang tidak layak dihuni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan, dan sarana prasarana yang tidak memadai. Menurut penelitian yang

dilakukan oleh Surtiani (2006), [8] permukiman kumuh dapat didefinisikan sebagai lingkungan padat penduduk dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, jumlah rumah yang sangat padat dengan ukuran di bawah rata-rata, fasilitas atau fisik yang tidak memenuhi persyaratan teknis, dan perumahan yang dibangun di atas tanah milik negara. Selain itu, permukiman kumuh dapat didefinisikan sebagai kawasan permukiman dengan kondisi hunian yang sangat buruk, sarana prasarana kepadatan bangunan, dan kebutuhan rumah sehat yang tidak memenuhi standar yang berlaku serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya (Suparlan, 1984). [9] Menurut beberapa definisi permukiman kumuh yang sudah dijelaskan, permukiman kumuh adalah lingkungan permukiman padat yang mengalami penurunan fungsi lingkungan karena kondisi bangunan yang tidak memenuhi standar, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang rendah, dan akses infrastruktur yang minim. [10]

Area squatter dan slum adalah dua kategori permukiman kumuh (Saraswati, 2000).[8]Perbedaan antara kedua jenis permukiman tersebut adalah status kepemilikan yang tidak jelas dan kondisi fisik dan geografis yang memadai. Slum area adalah permukiman kumuh yang berkaitan dengan masalah permukiman perkotaan apabila kondisi fisik lingkungannya tidak memadai dan kondisi geografisnya layak untuk dihuni. Di sisi lain, squatter area adalah permukiman yang dibangun di suatu area atau daerah permukiman, tempat-tempat yang terlarang dan ilegal. Ada beberapa kota kumuh di Indonesia dengan berbagai

tipologi. Selain itu, menurut Dokumen RKPKP Kota Surakarta tahun 2016, ada tiga kategori permukiman kumuh: permukiman kumuh di wilayah perkotaan yang padat, permukiman kumuh di bantaran sungai, dan permukiman kumuh di sepanjang rel kereta api. [11]

Permukiman kumuh terdiri dari area yang padat dan tidak teratur dengan tanah yang tidak dimiliki oleh penduduk. Tidak hanya dari segi fisik, permukiman kumuh juga memiliki ciri-ciri nonspatial, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. [12] Menurut temuan penelitian Averal et al. (2008), ciri khas permukiman kumuh adalah kondisi perumahan dengan kepadatan yang tinggi, ukuran unit rumah yang relatif kecil, dan atap rumah biasanya terbuat dari bahan yang sama dengan dindingnya. Kualitas rumah dengan kepadatan bangunan yang tinggi dan tidak permanen adalah karakteristik yang paling menonjol dari permukiman kumuh. Menurut Ditjen Perumahan dan Permukiman (2002), penduduknya berpendapatan rendah, memiliki sistem sosial yang rentan, sebagian besar orang bekerja di sektor informal, dan infrastruktur prasarana permukiman kurang. Seperti yang ditunjukkan di atas, permukiman kumuh adalah area permukiman yang dibangun tanpa perencanaan. Mereka biasanya memiliki kondisi fisik bangunan yang buruk, bangunan yang padat, sarana prasarana yang tidak memenuhi standar teknis, kepadatan penduduk yang tinggi, dan penduduk yang berpenghasilan rendah. [12]

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

menetapkan beberapa kriteria untuk mengevaluasi kondisi kekumuhan permukiman kumuh, yaitu: a) permukiman kumuh sangat padat dan tidak memenuhi persyaratan tata ruang; b) permukiman kumuh dilihat dari perspektif jalan lingkungan, yaitu kualitas jalan lingkungan yang buruk; c) permukiman kumuh dilihat dari segi drainase lingkungan, UN-Habitat (2008) juga menjelaskan kriteria permukiman kumuh, yaitu: a) fasilitas prasarana permukiman yang tidak memadai; b) ketersediaan sanitasi dan infrastruktur yang tidak memadai; c) kualitas bangunan yang buruk; d) ruang yang padat; dan e) kondisi kehidupan yang tidak aman. Kriteria kumuh didasarkan pada gagasan bahwa kumuh adalah keadaan fisik kawasan permukiman yang buruk atau rendah dan tidak memenuhi standar kelayakan yang disebabkan oleh berbagai penyebab, baik fisik maupun nonfisik. [13] Perkembangan kota yang pesat tidak diimbangi oleh pendapatan yang cukup, serta keterlambatan pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun prasarana di daerah perkembangan adalah penyebab permukiman kumuh. Permukiman dibangun oleh komunitas secara swadaya tanpa perencanaan tapak yang memadai seiring dengan meningkatnya permintaan perumahan. Beberapa faktor dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab permukiman kumuh, menurut Rindarjono & Gamal (2012): urbanisasi; sarana dan prasarana; lahan perkotaan; ekonomi; dan tata ruang. Empat penyebab permukiman kumuh adalah a) ekonomi, b) sosial; c) lingkungan, dan d) dukungan pemerintah, menurut analisis Wardhana (2015) di

Edwin Pasti TZ, Rina Saraswaty, Pola Permukiman Kumuh Pada Pinggiran Bantaran Rel Kereta Api di Jl. Ampera Raya, Kec. Medan Timur, Kota Medan

Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng,[14]

Menurut penelitian Krisandriyana (2017),[15] ada sejumlah alasan untuk munculnya permukiman kumuh, termasuk tata ruang, ekonomi, dan status lahan. Hal ini sesuai dengan Surtiani (2006),[3] yang menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti lama tinggal, status kepemilikan hunian, dan tingkat penghasilan dapat mempengaruhi kondisi kekumuhan sebuah wilayah. Menurut Suparno & Marlina (2006), [6] ada beberapa penyebab permukiman kumuh: urbanisasi, ekonomi, lahan perkotaan, sarana dan prasarana; sosial budaya, dan tata ruang. Khomarudin (1997) menjelaskan bahwa pemerintah adalah penyebab permukiman kumuh. Ketidakjelasan undang-undang, atau kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pemanfaatan ruang, menyebabkan bangunan yang tidak memenuhi standar rumah sehat. Dalam beberapa kasus, permukiman kumuh disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan peraturan dari pemerintah atau pengembang properti. Tanpa pengawasan yang ketat, masyarakat dapat membangun rumah yang tidak memenuhi standar dan mengabaikan peraturan. [15]

Aturan Sempadan Rel Kereta Api, Menurut UU No.23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, sempadan rel kereta api dapat digunakan sebagai jalur hijau untuk mengamankan jalur lalu lintas kereta api. UU tersebut juga menetapkan bahwa sempadan rel kertas harus berjarak 6 meter, baik di kanan maupun di kiri rel kereta api. Jika diteliti, permukiman di sekitar bantaran rel kereta api adalah permukiman yang tidak diinginkan. Namun, di kota-kota besar Indonesia, area

permukiman di sempadan rel kereta api telah berkembang pesat.[11]

Pola Sebaran Permukiman, berasal dari dua kata yaitu pola dan permukiman. Pola (pattern) dapat didefinisikan sebagai susunan struktural, gambar, corak, atau kombinasi sifat kecenderungan yang membentuk sesuatu yang taat asas dan unik (Depdikbud, 1988). Selain itu, pola juga dapat didefinisikan sebagai benda yang disusun menurut sistem tertentu mengikuti kecenderungan bentuk tertentu. Pengertian ini tampak serupa dengan pengertian model, atau susunan. Pola permukiman atau pola persebaran permukiman sering disalahartikan. Menurut Yunus (1989), kedua pengertian tersebut pada dasarnya sangat berbeda. Ini terutama benar ketika kita mempertimbangkan konteksnya. [16]

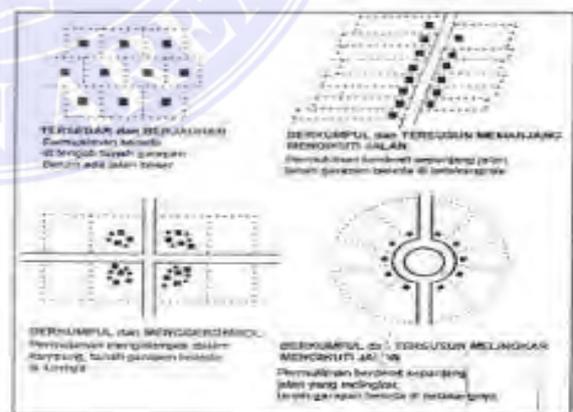
Pengertian pola permukiman sangat terkait dengan persebaran (dispersion) permukiman. Dalam daerah permukiman, persebaran permukiman menentukan lokasi permukiman. Dengan kata lain, distribusi permukiman mengacu pada lokasi permukiman. Selain itu, kita juga membahas bagaimana persebaran permukiman terjadi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan kata lain, pola permukiman adalah susunan sifat persebaran permukiman dan sifat hubungan antara faktor-faktor yang menentukan sifat persebaran permukiman tersebut. [8] Tiga jenis pola persebaran permukiman berbeda: pola bergerombol atau mengelompok (cluster pattern), pola acak (random pattern), dan pola tersebar (scatter pattern). Pola bergerombol terjadi ketika jarak antar unit permukiman dalam kelompok unit permukiman cukup besar (Hagget, 1970).[11] Susunan gambar,

corak, struktural, atau kombinasi sifat kecenderungan yang membentuk sesuatu yang taat asas dan unik disebut pola (Depdikbud, 1988 dalam Auliannisa, 2009). Pola juga dapat diartikan sebagai benda yang tersusun menurut sistem tertentu mengikuti kecenderungan bentuk tertentu. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "pola" sebagai model, sistem, cara kerja, atau bentuk (struktur) yang tetap.[14]

Jenis pola permukiman berbeda-beda tergantung pada lokasi permukiman dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduknya. Pola permukiman diklasifikasikan sebagai sederhana oleh Daldjoeni (2003) dan Wulan (2016). Ada tiga jenis permukiman: menyebar (dispersed), terpusat (nucleated), dan memanjang (linear). [8] Pola permukiman mengacu pada tempat di mana orang tinggal, menetap, dan melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari mereka. Permukiman adalah tempat (ruang) atau area di mana orang tinggal bersama-sama dengan memanfaatkan lingkungannya untuk melakukan, menjaga, melindungi, dan mengembangkan hidup mereka. Menurut Twin Star & Space (2005) dan Novitasari (2011), [15] pola permukiman dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah pola permukiman berbentuk memanjang (linier), yang terdiri dari panjang jalan, sungai, dan garis pantai. Yang kedua adalah pola permukiman berbentuk melingkar. Yang ketiga adalah pola permukiman berbentuk persegi panjang. Yang keempat adalah pola permukiman kubus.[3] Menurut Wiriaatmadja (1981) dan Pasundanie (2009), [1] pola spasial permukiman

terdiri dari: 1. Pola permukiman dengan jarak yang besar antara permukiman, terutama di wilayah yang baru digunakan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penduduknya memiliki banyak tanah yang harus dimanfaatkan secara turun temurun, meskipun tidak ada jalan besar. 2. Pola permukiman yang berkumpul dalam sebuah kampung atau desa dan memanjang mengikuti jalan (jalan darat atau sungai), sedangkan tanah yang dimanfaatkan berada di luar kampung. 3. Pola permukiman yang berkumpul dalam sebuah kampung atau desa dan memanjang mengikuti jalan, sedangkan tanah yang dimanfaatkan berada di luar kampung. 4. Pola permukiman yang berkumpul dan tersusun secara melingkar mengikuti jalan. Pola ini menggabungkan kampung atau desa di sekitar jalan, sedangkan tanah yang dimanfaatkan berada di sekelilingnya.[1]

Pola spasial permukiman yang disusun menurut Wiriaatmadja (1981) dan Pasundanie (2009) digambarkan pada gambar1.[1]



Gambar 1. tipe-tipe pola permukiman.,[1]
Sumber: diolah peneliti 2025

Edwin Pasti TZ, Rina Saraswaty, Pola Pemukiman Kumuh Pada Pinggiran Bantaran Rel Kereta Api di Jl. Ampera Raya, Kec. Medan Timur, Kota Medan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dan kuantitatif. Dalam buku Moleong (2006:4), Bogdan dan Taylor (1975:5) menyatakan bahwa metodologi kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati. Menurut Nazir (1988), tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran, deskripsi, atau lukisan yang sistematis, faktual, dan akurat tentang karakteristik, fakta, dan hubungan antara fenomena yang diteliti. [5]

Penelitian kualitatif memanfaatkan latar alamiah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang tersedia (Denzin dan Lincoln, 1987 dalam Gumilang, 2016).[1]

Kerlinger (1986) menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif berpusat pada pengumpulan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik untuk menemukan hubungan dan pola dalam populasi yang lebih besar.

Metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi pola sebaran permukiman kumuh di Jalan Ampera Raya, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dimulai dengan meninjau semua data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk foto atau gambar, pengamatan yang telah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan citra satelit. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan analisis yang menyeluruh, umum, dan terperinci tentang pola sebaran permukiman kumuh di Jalan Ampera. [17]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pola Sebaran Permukiman Pinggiran Bantara Rel Kereta Api Di Jalan Ampera Raya.

Di Jalan Ampera Raya, hanya ada satu titik gedung permukiman kumuh yang memusat di satu gedung permukiman. Ini membentuk pola permukiman kumuh linier atau mengikuti garis lurus jalur rel kereta api. Perkembangan permukiman kumuh yang tidak direncanakan mengarah pada seluru penjuru tanpa terencana sesuai dengan penambahan penduduk di gedung tersebut. Pola permukiman linear ini disebabkan oleh kondisi permukiman di sekitarnya, yang terdiri dari perumahan padat penduduk serta gedung sekolah dan universitas. Pola permukiman linear ini dibentuk oleh rumah yang saling berdekatan dan kekurangan infrastruktur, sesuai dengan kondisi permukiman kumuh di Jalan Ampera Raya. [6]

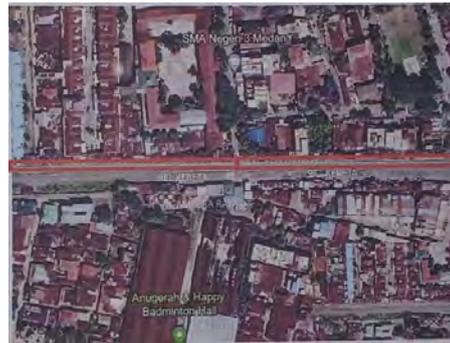


Gambar 2. kondisi eksisting pada area bantara kereta api jl. Ampera raya
Sumber: diolah peneliti 2025

Edwin Pasti TZ, Rina Saraswaty, Pola Pemukiman Kumuh Pada Pinggiran Bantaran Rel Kereta Api di Jl. Ampera Raya, Kec. Medan Timur, Kota Medan



Gambar 3. kondisi kawasan area pemukiman kumuh pada area palang pintu KA jl. Budi kemasyarakatan
Sumber : Hasil Obsevasi.



Gambar 7. Kawasan Area Pemukiman Kumuh Pada Bantara Rel Kereta Api, Di Jl Ampera Raya
Sumber: Hasil Obsevasi.



Gambar 4. Kondisi Gedung Sma 3 Medan
Sumber : Hasil Obsevasi.

berdampingan dengan pemukiman penduduk yang padat dan gedung sekolah dan universitas. Tanah atau lahan legal yang dulunya belum dimanfaatkan juga memengaruhi sebaran permukiman kumuh karena banyak rumah kumuh yang dibangun di atas tanah tersebut. [5]



Gambar 5. Kondisi Pemukiman Kumuh Pada Area Jl. Ampera Medan
Sumber : Hasil Obsevasi.

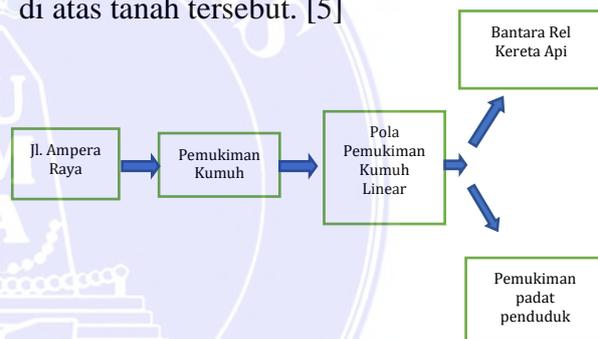


Diagram pola pemukiman kumuh jalan ampera.



Gambar 6. kondisi pemukiman kumuh pada area parkir belakang universitas muhammadiyah
Sumber: Hasil Obsevasi.

Permukiman kumuh yang tersebar di Jalan Ampera Raya cenderung berada di daerah yang padat penduduk, pusat pendidikan, pasar, dan area rel kereta api. Pemilihan lokasi bermukim ini dipengaruhi oleh sumber pendapatan atau pekerjaan warga yang tinggal di daerah tersebut, sehingga warga memilih daerah tersebut untuk memudahkan aktivitas yang berkaitan dengan sumber pendapatan mereka. Selain itu, ketersediaan lahan yang sah maupun ilegal di daerah ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan

Edwin Pasti TZ, Rina Saraswaty, Pola Pemukiman Kumuh Pada Pinggiran Bantaran Rel Kereta Api di Jl. Ampera Raya, Kec. Medan Timur, Kota Medan

permukiman kumuh karena masyarakat lebih cenderung membangun rumah di lahan yang belum digunakan sebelumnya, membentuk permukiman dengan bangunan yang padat dan ruang yang sempit. [4]



Gambar 8. Pola permukiman kumuh pada bantara rel kereta api di jl ampera raya

Pola tata letak permukiman yang bergerak sepanjang garis lurus atau mengikuti jalur tertentu, seperti garis bantaran rel kereta api, disebut pola permukiman linear. Faktor-faktor geografis, sosial, atau ekonomi tertentu yang mempengaruhi distribusi dan perkembangan permukiman di suatu wilayah sering kali menciptakan pola ini. Karena terkonsentrasi di sepanjang bantaran rel kereta api, permukiman kumuh di Jalan Ampera Raya hanya berkonsentrasi di satu gedung permukiman. Ini menunjukkan pola permukiman linear. Mengikuti garis lurus jalur rel kereta api, pola permukiman kumuh linier ini disebabkan oleh kondisi permukiman di sekitarnya, yang terdiri dari perumahan padat penduduk serta gedung pendidikan dan universitas. Pemilihan lokasi bermukim ini dipengaruhi oleh sumber pendapatan atau pekerjaan warga yang tinggal di daerah tersebut; akibatnya, warga memilih daerah tersebut untuk memudahkan aktivitas yang berkaitan dengan sumber

pendapatan mereka. Kerlinger (1986) menyatakan bahwa "Pola permukiman linear sering kali muncul sebagai akibat dari pengaruh geografis atau infrastruktur yang ada, seperti jalur transportasi atau rel kereta api yang memberikan batasan alami bagi perkembangan permukiman." Selain itu, Creswell (2009) menyatakan bahwa "Pola permukiman linear dapat dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur distribusi dan kepadatan populasi di sepanjang jalur tertentu, dengan memperhitungkan faktor-faktor lingkungan dan sosial."

2. Tata Ruang Wilayah Pada Permukiman Kumuh Di Sempadan Rel Kereta Api Jl. Ampera Raya.

Menurut rtrw kota medan 2010-2030, peruntukan area jalan ampera raya adalah permukiman, sarana, perdagangan, dan jasa. Setelah dievaluasi kembali dengan kondisi lapangan saat ini, tingkat kesesuaian pola ruang dan lapangan lebih dari 75%. Satu-satunya ketidaksesuaian adalah peruntukan di sempadan rel kereta api. Berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum nomor 05/prt/m/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, sempadan rel kereta api dapat digunakan sebagai pengamanan jalur lalu lintas kereta api untuk menjaga keselamatan lalu lintas kereta api dan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, berbagai aktivitas yang terkait dengan peran ruang terbuka hijau harus dilakukan untuk menjaga keselamatan lalu lintas kereta api dan masyarakat sekitar. [8]

Berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner yang kami lakukan kepada Masyarakat permukiman kumuh pada bantaran rel kereta api di jalan Ampera

Edwin Pasti TZ, Rina Saraswaty, Pola Pemukiman Kumuh Pada Pinggiran Bantaran Rel Kereta Api di Jl. Ampera Raya, Kec. Medan Timur, Kota Medan

Raya, Kec. Medan Timur, Kota Medan terdapat beberapa kriteria penilaian yaitu Keamanan di sekitar rel kereta api, Keamanan yang dimaksud dalam hal ini kecelakaan pada area jalur kereta api yang perlu diperhatikan, seperti pada area perlintasan kereta api hingga kasus kriminalitas kemiskinan yang terjadi

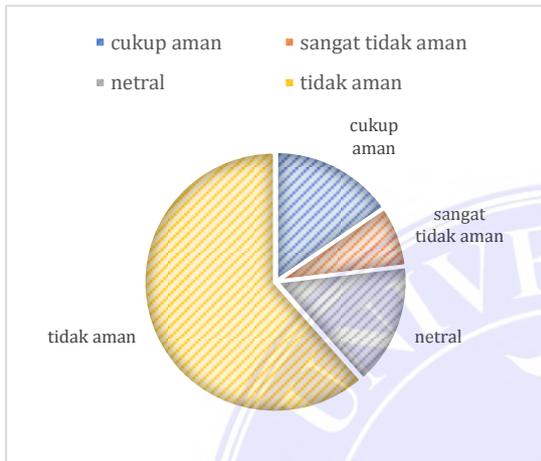


Diagram lingkaran berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat pemukiman kumuh di jalan ampera raya

Berdasarkan kuesioner mengenai keamanan pada permukiman sumuh bantaran rel kereta api di Jalan Ampera Raya, dapat dilihat 15,4% menyatakan bahwa mereka merasa Cukup Aman, 15,4% merasa Netral, 61,5% merasa Tioak man, Dam 7,7% merasa sangat Tidak Aman

Gangguan kebisingan di sekitar neli kareta agu. Gangguan kansangan sang dimaksud dalam hal ini gangguan dari suara kendaraan yang melintas di sekhar aras jalur kereta api terutama kereta api



Diagram lingkaran berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat pemukiman kumuh di jalan ampera raya

Berdasarkan kuesioner mengenai masalah gangguan kebisingan dari aktivitas kereta api di bantaran rel kereta api di Jalan Ampera Raya, dapat dilihat 38,5% menyatakan TERGANGGU, 61,5% menyatakan TIDAK TERGANGGU

Akses fasilitas umum di sekitar rel kereta api. Akses fasilitas umum di sekitar rel kereta api yang dimaksud dalam hal ini yaitu akses menuju sarana Pendidikan dan mushola di sekitar area jalur kereta api.



Diagram lingkaran berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat pemukiman kumuh di jalan ampera raya

Edwin Pasti TZ, Rina Saraswaty, Pola Pemukiman Kumuh Pada Pinggiran Bantaran Rel Kereta Api di Jl. Ampera Raya, Kec. Medan Timur, Kota Medan

Berdasarkan kuesioner mengenai masalah akses fasilitas umum seperti Sarana Pendidikan dan Musholah di bantaran rel kereta api di Jalan Ampera Raya, dapat dilihat 46,2% menyatakan MUDAH, 53,8% menyatakan TIDAK MUDAH.

Masalah tentang kebersihan (limbah/sampah) di sekitar rel kereta api. Masalah kebersihan yang dimaksud dalam hal ini yaitu, masih banyaknya limbah sampah di area jalur kereta api yang bisa berdampak buruk kepada permukiman kumuh dan lingkungan sekitarnya.

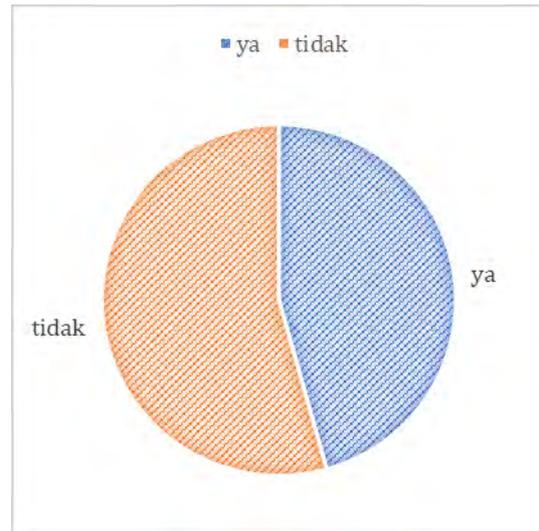


Diagram lingkaran berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat permukiman kumuh di jalan ampera raya



Diagram lingkaran berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat permukiman kumuh di jalan ampera raya

Berdasarkan kuesioner mengenai masalah limbah atau sampah pada permukiman kumuh di bantaran rel kereta api di Jalan Ampera Raya, dapat dilihat 84,6% menyatakan YA, 15,4% menyatakan TIDAK.

Program pemerintah. Program pemerintah yang dimaksud dalam hal ini untuk lebih memperhatikan juga meningkatkan kondisi dan kualitas tempat tinggal di permukiman sekitar area jalur kereta api.

Berdasarkan kuesioner mengenai inisiatif atau program untuk meningkatkan kondisi permukiman pada permukiman kumuh di bantaran rel kereta api di Jalan Ampera Raya, dapat dilihat 46,2% menyatakan YA, 53,8% menyatakan TIDAK.

SIMPULAN

Studi ini menemukan pola permukiman kumuh yang berbentuk linear yang mengikuti jalur rel kereta api di Jalan Ampera Raya, Kota Medan. Pola ini memiliki karakteristik bangunan yang padat dan terkonsentrasi di sekitar pusat pendidikan dan pasar. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketersediaan lahan yang legal dan ilegal serta preferensi penduduk terhadap kemudahan mendapatkan uang. Keamanan, akses ke fasilitas umum, dan manajemen limbah adalah masalah besar yang ditunjukkan oleh analisis pola ini. Meskipun ada kebutuhan yang besar untuk perbaikan kondisi permukiman, sebagian besar penduduk mengatakan bahwa mereka membutuhkan lebih

Edwin Pasti TZ, Rina Saraswaty, Pola Pemukiman Kumuh Pada Pinggiran Bantaran Rel Kereta Api di Jl. Ampera Raya, Kec. Medan Timur, Kota Medan

banyak upaya dan program untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan dan intervensi pemerintah yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan kondisi permukiman dan kualitas hidup penduduk

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Aspin and N. Nafsi, "Pola Sebaran Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang)," *Nat. Natl. Acad. J. Archit*, vol. 8, no. 1, p. 39, 2021, doi: 10.24252/nature.v8i1a4,
- [2] Sumarwanto, "Pengaruh Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Permukiman Kumuh Terhadap Tata Ruang Wilayah di Semarang," *Serat Acitya J. ilmiah UNTAG Semarang*, vol. 3, no. 1, pp. 94-101, 2014.
- [3] K. Putri, M. A. Ridlo, and H. Widyasamratri, "Studi Literatur: Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di Perkotaan," *J. Kaji. Ruang*, vol. 3, no. 1, p. 104, 2023, doi: 10.30659/jkr.v3i1.22909.
- [4] C. D. Qonita and D. Rahmawati, "Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di Area Pendukung Industri Kelurahan Krian, Kabupaten Sidoarjo," *J. Tek ITS*, vol. 9, no. 2, 2021, doi: 10.12962/j23373539.v9i2.56302.
- [5] A. Dalilah and R. Ridwana, "Pemanfaatan Pengindraan Jauh Untuk Identifikasi Permukiman Kumuh di Kota Bandung," *J. Ilm. Ilmu Sos.*, vol. 5, no. 2, p. 71, 2019, doi: 10.23887/jiis.v5i2.21773.
- [6] C. M. Araujo, W. Astuti, and G. Yudana, "Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kawasan Semanggi, Kota Surakarta," *J. Perenc. Wilayah, Kota, dan Permukim.*, vol. 5, no. 2008, pp. 155-169, 2023, [Online]. Available: <http://jurnal.uns.ac.id/jdk>
- [7] K. B. Syariah and G. Ilmu, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title," vol. 4, no. september 2016, pp. 1-6.
- [8] Rini Asmariati, D. Aryanti, Fajar Agung Mulia, and Jomy Yunaldi, "Arahan Penataan Permukiman Kumuh Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang," *J. Rekayasa*, vol. 10, no. 2, pp. 84-94, 2021, doi: 10.37037/jrftsp.v10i2.59.
- [9] ecia meilonna, "UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Poliklinik UNIVERSITAS SUMATERA UTARA," *J. Pembang. Wil. Kota*, vol. 1, no. 3, pp. 82-91, 2018.
- [10] U. Pal, "From Welfare to Participation-The Changing Narratives of Slum Rehabilitation and Housing for the Urban Poor in Delhi," *Adv. 21st Century Hum. Settlements*, pp. 501-512, 2021, doi: 10.1007/978-981-15-5608-1_39.
- [11] U. Syiah Kuala, B. Bakti, M. Irwansyah, and M. Isya, "Darussalam Banda Aceh 23111, email: baron_pijay@yahoo.co.id 2) Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik," *Univ. Syiah Kuala Jl. Tgk. Syeh Abdul Rauf*, vol. 1, no. 7, pp. 329-338, 2311
- [12] P. Bela Barbara and E. Umilia, "Clustering Permukiman Kumuh," *Tek. Pomits*, vol. 3, no. 2, pp. 172-177, 2014, [Online]. Available: <http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/download/7262/1901>
- [13] N. H. Purnomo and M. Si, "NGAGELREJO KECAMATAN WONOKROMO KOTA SURABAYA Ika Wahyuningtyas Abstrak," *Swara Bhumi*, vol. 2, no. 1, pp. 1-8, 2020.
- [14] T. Putri, A. Poli, P. P. Egam, and S. Tilaar, "Sebaran Lokasi Permukiman Kumuh Di Kota Manado," *Spasial*, vol. 2, no. 3, pp. 102-111, 2015.
- [15] P. Kumuh, "MATRAPOLIS Implementasi Konsep Kampung Tematik sebagai Solusi," pp. 31-46, 2020.
- [16] D. Prihatiningsih and D. F. Swasto, "Strategi Adaptasi Masyarakat Di Permukiman Sekitar Bantaran Rel Kereta Api Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta," *Reka Ruang*, vol. 4, no. 1, pp. 1-13, 2021.
- [17] D. A. Chimankar, "Urbanization and condition of Urban Slums in India," *Indones. J. Geogr.*, vol. 48, no. 1, pp. 28-38, 2016, doi: 10.22146/ijg.12466.
- [18] P. Fallavier, "Urban Slums report: The case of Phnom Penh, Cambodia," no. January 2003, pp. 1-31, 2003, [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/200538441>
- [19] Raisha Ghadati Raudina, "Urban Settlement Patterns in edge of Railroad in Medan City," *Int. J. Archit. Urban.*, vol. 4, no. 3, pp. 227-236, 2020, doi: 10.32734/ijau.v4i3.5034.
- [20] N. Yenny, R. Rohani, K. Pinem, N. Anggraini, and Y. Harianja, "Kampung Aur Slum Settlement and Relocation Reluctance," 2019, doi: 10.4108/eai.24-10-2019.2290618.